

BAB I

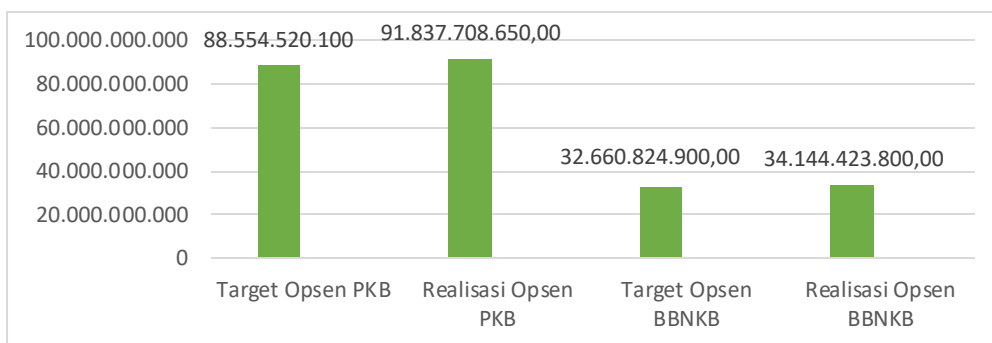
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan elemen penting dalam struktur APBN serta APBD di Negara Indonesia. Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pajak memiliki peran sebagai alat pembiayaan bagi pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Indriasih et al., 2021). Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah memiliki peran penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dan pertumbuhan yang signifikan (Sumual et al., 2024).

Namun, hambatan utama dalam pemungutan pajak di Indonesia termasuk pajak kendaraan bermotor adalah rendahnya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak, meskipun kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahun seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat. Hal ini tidak selalu sejalan dengan penerimaan pajak yang sebenarnya. Fenomena selisih pajak atau *tax gap*, yaitu perbedaan antara pajak yang seharusnya dibayarkan dan yang sebenarnya diterima masih menjadi masalah sistematis (Misra, 2019). Di provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Mojokerto, perubahan kepatuhan tetap menjadi perhatian serius bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan orang pribadi kepada negara

berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tidak menerima imbalan secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Anggi, 2023). Berikut ini merupakan data hasil rekap target opsen pajak dan realisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026.



Gambar 1. 1
Data Target Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto diolah, 2026

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui capaian pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor menunjukkan tren yang positif karena seluruh realisasi berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pada opsen pajak kendaraan bermotor, target yang ditetapkan sebesar Rp88,55 Miliar yang berhasil direalisasikan mencapai angka Rp91,84 Miliar. Terdapat pelampauan target sebesar Rp3,29 Miliar. Kondisi serupa juga terjadi pada Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang realisasinya mencapai Rp34,14 Miliar dari target awal senilai Rp32,66 Miliar, dan terdapat kenaikan sebesar Rp1,48 Miliar dari angka yang direncanakan. Secara keseluruhan data ini menggambarkan kinerja

pemungutan pajak yang sangat efektif karena opsen PKB dan opsen BBNKB mampu memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar dibandingkan ekspektasi yang tertuang dalam anggaran target. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, baik dalam pendaftaran, perhitungan, pembayaran, ataupun pelaporan pajak secara benar, lengkap, serta tepat waktu (Rizky, 2020). Namun kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara melonjaknya kepemilikan kendaraan bermotor dan realisasi kepatuhan wajib pajak di kabupaten Mojokerto. Berangkat dari fenomena tersebut, serta mempertimbangkan beragamnya pemahaman, kesadaran, persepsi sanksi, dan kualitas layanan yang diterima masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris sejauh mana keempat faktor itu memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Berdasarkan penelitian Zaikin (2023) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Ayu (2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Perdana (2020) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Wardani (2017) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Yulianti & Fauzi (2020) ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Mei (2022) kualitas pelayanan tidak menjadi faktor dominan terhadap kepatuhan karena yang lebih berpengaruh merupakan akses dan fasilitas serta faktor internal wajib pajak.

Fenomena pada penelitian ini didasarkan karena masih adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagai wajib pajak meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan layanan seperti Samsat keliling, e-Samsat, serta program pemutihan pajak, namun kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, efektivitas sanksi, dan kualitas layanan masih menjadi permasalahan yang diduga mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu masih ditemukan masyarakat yang kurang memahami prosedur pembayaran pajak, manfaat pajak bagi pembangunan daerah dan kurangnya kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak terkadang belum memberikan efek jera secara maksimal sehingga sebagian wajib pajak tetap melakukan keterlambatan dalam membayar pajak. Permasalahan lain juga muncul dari aspek kualitas pelayanan pajak. Meskipun pelayanan samsat sudah mulai berkembang melalui sistem digital dan pelayanan terpadu masih terdapat keluhan terkait antrean, keterbatasan informasi maupun kualitas pelayanan yang belum merata.

Kondisi tersebut yang dapat mempengaruhi minat dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun, sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor juga sangat besar. Namun peningkatan jumlah kendaraan belum tentu diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Karena itu penelitian ini penting untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak dapat dianalisis melalui *theory of planned behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa niat berperilaku (*behavioral intention*) tidak hanya ditentukan oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif (*subjective norm*), tetapi juga dipengaruhi pandangan tentang kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). TBP merupakan pengembangan dari *theory reasoned action* yang digunakan dalam perilaku konsumen. Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku individu ditentukan niat yang dimiliki, yang dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Bangun, 2023). Dalam hal pajak kendaraan bermotor, niat seorang pemilik untuk

membayar pajak tepat waktu sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada.

Selain TPB, *Attribution Theory* memiliki relevansi dalam menjelaskan bagaimana wajib pajak mengevaluasi penyebab dari suatu peristiwa. Apabila wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang disediakan Bapenda Kabupaten Mojokerto atau Samsat tidak memadai atau bahwa sanksi yang ada tidak cukup ketat, masyarakat cenderung mencari alasan untuk tidak memenuhi kewajiban (Trisnawati, 2023). Di sisi lain pemahaman yang lebih baik tentang fungsi pajak dapat mendorong atribusi positif yang berasal dari dalam diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan masyarakat (Made et al., 2023).

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan individu yang dikenakan pajak menyadari, merasakan, dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran ini bukan hanya sekedar mengetahui adanya regulasi, tetapi juga memahami bahwa pajak merupakan kontribusi bersama untuk pembangunan wilayah (Ristanti et al., 2022). Banyak warga di Kabupaten Mojokerto yang mungkin melihat pajak hanya sebagai beban ekonomi dan bukan sebagai kewajiban warga negara. Tanpa pemahaman yang mendalam berbagai kebijakan atau ancaman sanksi tidak akan efektif dalam jangka panjang. Penelitian Arini (2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi,

wajib pajak akan memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Nihlah et al., 2024).

Pengetahuan perpajakan juga menjadi dasar utama pencapaian kepatuhan (Ristanti et al., 2022). Bagaimana mungkin wajib pajak bisa memenuhi kewajiban jika wajib pajak tidak tahu cara mendaftar, menghitung tarif, dan mengetahui tenggat waktu untuk membayar. Seringkali rumitnya birokrasi menjadi penghalang di zaman digital saat ini, hadirnya sistem pembayaran elektronik seperti Samsat Digital diharapkan dapat meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat (Dewi, 2019). Namun, ketidaksetaraan informasi anantara masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Mojokerto mengenai mekanisme pajak kendaraan sering menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam pembayaran. Penelitian Widya (2021) dan Syarif (2023) pengetahuan perpajakan menjadi faktor untuk meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena semakin paham wajib pajak tentang peraturan serta tata cara perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar para wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Hidayat, 2025). Dalam peraturan Undang Undang No 28 Tahun 2003, telah ditetapkan sanksi administratif berupa denda untuk keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, keberhasilan dari sanksi ini sangat bergantung pada ketegasan

pihak berwenang dalam melaksanakannya. Apabila para wajib pajak melihat sanksi sebagai sesuatu yang bisa dinegoisasi atau jika terdapat kebijakan pengampunan denda yang tidak pasti maka kekuatan sanksi akan berkurang dan individu cenderung menunda pembayaran pajak hingga masa pemutihan (Amalia, 2025). Penelitian Adawiya (2023) sanksi merupakan jaminan agar ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat wajib pajak untuk mencegah pelanggaran norma, dimana sanksi tersebut berfungsi sebagai bentuk kedisiplinan.

Kualitas layanan merupakan bentuk interaksi langsung antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat yang berperan sebagai pembayar pajak. Layanan yang cepat, ramah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan di kantor Samsat Kabupaten Mojokerto akan memberikan kepuasan bagi para wajib pajak. Sebaliknya prosedur yang rumit serta fasilitas yang tidak nyaman akan menimbulkan resistensi. Masyarakat lebih bersedia membayar pajak jika Masyarakat merasa dihargai melalui pelayanan yang baik (Susilo et al., 2024). Penelitian Rizky (2020) Kualitas layanan pajak merupakan merupakan pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada masyarakat wajib pajak untuk membantu, mengelola, dan mempermudah urusan perpajakan dan memenuhi kebutuhan wajib pajak.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan empat variabel sekaligus, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak,

sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini juga menggabungkan *theory of planned behavior* dan *attribution theory* dalam menjelaskan perilaku wajib pajak sehingga tidak hanya melihat faktor dari dalam diri wajib pajak seperti kesadaran dan pengetahuan, tetapi faktor dari luar seperti sanksi dan pelayanan yang diberikan. Selain itu penelitian ini dilakukan pada kondisi pelayanan pajak yang sudah mulai berkembang ke arah digital dan pelayanan terpadu sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi kepatuhan wajib pajak yang lebih sesuai dengan keadaan saat ini. Fokus penelitian di wilayah Kabupaten Mojokerto juga menjadi nilai tambah karena setiap daerah memiliki karakteristik wajib pajak yang berbeda, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan relevan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penyusunan penelitian ini didorong oleh kondisi nyata di lapangan. Kabupaten Mojokerto sebagai wilayah strategis penghubung antar kota di wilayah Jawa Timur dengan jumlah kendaraan bermotor yang sangat masif. Dari kondisi tersebut mendorong motivasi penelitian ini untuk menganalisis kembali pengaruh terhadap keempat variabel terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya pada wajib pajak di Wilayah Kabupaten Mojokerto yang masih terbatas diteliti sekaligus memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat

theory of planned behavior sebagai landasan teoritis bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh niat serta faktor perilaku dan memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan fenomena maka dilakukan penelitian mendalam terhadap Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Mojokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah pengetahuan tentang pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto?
4. Apakah kualitas layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Mojokerto.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dalam pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian untuk memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan ilmu akuntansi perpajakan, terutama dalam memperkuat penerapan *attribution theory* dan *theory of planned*

behavior untuk menjelaskan bagaimana faktor internal seperti kesadaran wajib pajak dan pengetahuan para wajib pajak, serta faktor eksternal yang meliputi sanksi pajak dan kualitas pelayanan saling berinteraksi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan dalam bidang penelitian secara teoritis yang berisi wawancara penulisan, serta menyediakan kajian dan pemikiran mengenai tanggung jawab perpajakan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah (BAPENDA) dan Samsat Kabupaten Mojokerto)

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Bagi Petugas Pelayanan Pajak

Diharapkan hasil penelitian memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang selama ini diberikan, dengan mengetahui kualitas layanan dan efektivitas sanksi mempengaruhi kepatuhan. Petugas juga dapat memperbaiki pola komunikasi serta efisiensi birokrasi agar masyarakat wajib pajak merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajibannya.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian diharapkan meningkatkan literasi serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran dan pengetahuan pajak. Melalui hasil penelitian yang dipublikasikan, masyarakat dapat melihat bahwa kepatuhan masyarakat berkontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik, khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi lain yang ingin meneliti topik yang serupa dengan wilayah atau variabel yang berbeda, selain itu hasil dari penelitian ini bisa menjadi perbandingan untuk melihat tren kepatuhan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di daerah Jawa Timur.